PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

UNIT KERJA : **PIMPINAN TERTINGGI**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HADI**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **465292**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 9.332.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/114 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1660 m2/216 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, WARISAN Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 232956 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.640.000.000
6. Tanah Seluas 110000 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
7. Tanah Seluas 394 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 1360 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 272.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 625.500.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, WARISAN Rp. 190.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

240.000.000

5. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2019, WARISAN Rp. 180.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**5.400.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**700.050.000**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**10.662.950.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**2.151.301.436**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**8.511.648.564**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.